



KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA

Moch. Dimas Galuh Mahardika

dimas.dg20@gmail.com

Universitas Sebelas Maret, Indonesia.

Abstract: *The diversity integrated in the frame of the unitary State of the Republic of Indonesia is a must-focus observation in the context of today's education. Since this country is a country populated by a wide variety of nationalities, races and religions, a little bit becomes one of the factors of the occurrence of a conflict that smells of SARA, as if to harm the tolerance of diversity and the difference itself. Then education must be present in a new frame to accommodate the mind and understanding of diversity to be then taught to the community. Multicultural education can be one of the alternatives for campaigning and teaching diversity in the framework of more concrete thinking and practice, by giving an understanding of how to live life in the midst of a diverse community environment*

Keywords: *diversity, multicultural education.*



ARTICLE INFO:
Research Article

Article history:

Received 4 June 2020

Revised 23 August 2020

Accepted 16 September 2020

Published 20 December 2020

Available online 20 December 2020

©2020. JPSI. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan merupakan faktor terpenting dalam perkembangan diri setiap individu. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha untuk memanusiakan manusia itu sendiri, karena pendidikan bersifat membudayakan manusia. Namun di dalam pendidikan juga terdapat banyak perbedaan filsafati dan pandangan hidup yang dianut oleh masing-masing individu yang kemudian menyebabkan perbedaan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tersebut. Pendidikan yang diselenggarakan pada suatu wilayah yang dihuni oleh suatu bangsa dengan wilayah lain pasti akan berbeda, karena antara satu bangsa dengan bangsa yang lain tidak memiliki satu pandangan filsafati yang sama tentang pendidikan. Kegiatan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan po-

tensi-potensi dasar manusia agar dapat diterapkan secara nyata dalam lingkungan sosialnya (Kymlicka, 1995).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 paragraf ke empat, secara jelas hakikat pendidikan adalah untuk “mencerdaskan kahidupan bangsa”. Jika kita bersedia mendefinisikan lebih jauh satu persatu, kata “mencerdaskan” dapat dimaknai sebagai dua subjek yang saling berinteraksi, antara pihak yang mencerdaskan dan pihak yang dicerdaskan. Sedangkan yang dimaksud “bangsa” adalah keseluruhan manusia yang hidup di tanah Nusantara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa terkecuali. Dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, ada dua pihak yang saling berinteraksi yakni pendidik dan peserta didik. Seorang pendidik haru memberikan sikap yang humanis kepada peserta didik supaya pengeetahuan yang diberikan dapat diinternalisasi dengan baik oleh peserta didik. Pendidik dengan rendah hati seyogyanya bersedia menciptakan relasi emosional dan intelektual guna melayani siswa atau mahasiswa (Hariyono, 2018: 5)

Pendidikan multikultural hari ini tampaknya cukup penting untuk diterapkan dalam sistem pendidikan kita, meskipun saat ini pendidikan multikultural masih bersifat gerakan yang belum diinternalisasi di dalam sistem pendidikan. Pendidikan multikulturalisme di Indonesia menjadi wacana akademik yang cukup menarik sejak awal tahun 2000 (Nurchayono, 2018). Secara harafiah, multikultural memiliki arti: multi (plural) dan kultural (tentang budaya), multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap tahap sejaah kehidupan masyarakat (Irhandayaningsih, 2012).

Sesuai dengan harapan diterapkannya Kurikulum 2013 yang menekankan pada pembentukan karakter, sehingga kemudian pendidikan multikultural akan lebih cocok untuk membentuk karakter yang toleran dengan berbagai keberagaman. Permasalahan sosial yang sering kita dengarkan hari ini berkisar pada isu SARA (Suku, Ras, Agama dan Antargolongan) yang selalu menjadi sumbu pendek sebagai akar konflik. Peran sekolah, guru, dan sistem pendidikan sangatlah penting dalam hal ini untuk menumbuhkan rasa peduli, toleran dan siap menerima segala perbedaan yang memungkinkan kita untuk hidup di tengah perbedaan tersebut. Sikap menerima tidak hanya sekedar ucapan formal saja, jauh lebih penting ketika diimplementasikan dalam bentuk apresiasi, memberi ruang, dan melindungi keberagaman itu sendiri. Pendidikan multikultural akan memberikan sumbangan dalam kehidupan manusia yang adil dan bebas dalam keberagaman (Teasley & Tyson, 2007).

Indonesia sebagai negara demokrasi sudah sepantasnya menunjung tinggi pluralisme. Kebiasaan yang akan dibangun adalah kebiasaan hidup berdampingan dengan berbagai macam perbedaan, yang kemudian tidak lantas dijadikan sekat dalam interaksi sehari-hari. Justru dari berbagai perbedaan yang ada dapat dijadikan sarana diskusi untuk saling bertukar pikiran, membangun pengetahuan bersama dengan harapan dapat menghasilkan nilai-nilai toleran. Toleransi itulah yang kemudian dapat dijadikan suatu alat untuk meredam konflik yang terjadi. Seperti misalnya dalam beberapa tahun ke belakang, kerap terjadi konflik yang mengatas namakan agama. Entah ia mun-

cul sebagai akibat hubungan antar umat beragama yang tidak dibarengi sikap toleran, atau ia sengaja diciptakan untuk mendukung kepentingan kelompok tertentu (Agung, 2017).

Itulah yang kemudian menjadi urgensi pendidikan multikultural dalam dinamika pendidikan kita hari ini untuk membendung segala potensi negatif, dan menciptakan suasana yang penuh toleransi, karena pada dasarnya output yang dihasilkan dari pendidikan multikultural adalah kerukunan yang mampu untuk saling menerima perbedaan dalam keberagaman. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk melengkapi perspektif dari berbagai gagasan tentang pendidikan multikultural ini, penulis mencoba untuk menyumbangkan sebuah pemikiran terkait “Kerangka Konseptual Untuk Pendidikan Multikultural di Indonesia”.

METODE

Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian pustaka. Zed (2004) memaparkan ciri-ciri utama studi kepustakaan: (a) berhadapan langsung dengan teks; (b) bersifat siap pakai; (c) sumber yang digunakan pada umumnya adalah sumber sekunder. Selain buku, penulis juga menggunakan beberapa jurnal yang relevan dengan pembahasan pada tulisan ini. Sumber yang didapatkan kemudian diolah untuk memberikan referensi kepada penulis supaya pembahasan di dalam artikel ini tepat sasaran sesuai judul yang diusung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pluralitas: Identitas Sebuah Kekayaan

Indonesia adalah sebuah bangsa yang terdiri dari banyak sekali suku, ras yang memiliki peradaban cukup tinggi, sebelum mengenal budaya modern—budaya yang dikenalkan oleh orang-orang Eropa. Sebagai sebuah negara yang berbentuk Negara Kesatuan, keberagaman adalah salah satu aset berharga yang dimiliki bangsa ini sebagai sebuah identitas yang khas, salah satu ciri pembeda dari peradaban lain. Indonesia terbentang dari sisi barat pulau Sumatera sampai ke sisi timur bumi Papua, merupakan salah satu bangsa di dunia ini yang menyimpan potensi-potensi pluralisme. Bangsa ini terdiri atas berbagai suku, agama dan ras (Hidayat, 2006). Maka hal inilah yang sesungguhnya menjadi identitas tersendiri bagi bangsa Indonesia di tengah peradaban global. Pertanyaannya adalah apakah pluralitas bangsa Indonesia hari ini sudah menjadi sebuah pemahaman yang konkrit bagi setiap masyarakat?

Pluralitas dan heterogenitas yang tercermin pada masyarakat Indonesia diikat dalam prinsip persatuan dan kesatuan bangsa yang kita kenal dengan semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*”, yang bermakna meskipun Indonesia berbhinneka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan (Lestari, 2015, hlm. 31). Acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tercantum secara filosofis dalam sila-sila Pancasila, dan aturan-aturan hukum yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kekayaan Indonesia akan keberagaman tentunya sudah melewati proses sejarah yang cukup panjang, dengan proses pembentukan peradaban yang cukup tinggi. Sedikit menoleh ke belakang, peradaban Indonesia yang maju dengan masyarakat yang majemuk ditunjukkan oleh karya-karya

bernilai kebudayaan tinggi seperti Candi sebagai tempat peribadahan dengan ornamen dan arsitekturnya yang sarat dengan nilai filosofis. Masa berikutnya saat pengaruh Islam mulai masuk, terjadilah akulturasi baik dari segi ritual maupun bentuk fisik tempat peribadahan. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal keberagaman bangsa kita hari ini.

Eksistensi kebudayaan setiap daerah dalam kerangka NKRI sampai hari ini masih dapat kita lihat. Bahkan tidak menutup kemungkinan, siapapun dapat membawa kebudayaan aslinya ke tempat baru yang ditinggali. Misalnya saja ketika seorang dari Flores yang hidup di Jawa, ia sangat berpotensi untuk membawa kebudayaannya dan meleburkannya dengan kebudayaan Jawa, dan itu adalah kemungkinan yang nyata. Hanya saja semua kemungkinan itu dapat terakomodir atau tidak di dalam kehidupan bermasyarakat? Inilah kemudian yang menjadi fokus kita bersama dalam menanamkan pemahaman tentang keberagaman yang dampaknya akan berlaku sampai seterusnya selama negara ini berdiri sebagai tempat banyak kebudayaan dan suku bangsa hidup.

Barangkali kita boleh bangga terhadap kekayaan yang kita miliki ini, karena tidak semua bangsa di dunia memiliki apa yang kita miliki. Namun kebanggaan itu harus dibarengi dengan pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang bersifat multikultur. Pencapaian dari sebuah pemahaman tentang keberagaman akan terlihat pada pola pikir dan tindakan setiap warga negara dalam menyikapi perbedaan itu sendiri. Maka dalam posisi semacam ini, pendidikan menduduki tempat yang penting dalam memberikan pemahaman akan hal tersebut, tentu saja secara spesifik pendidikan multikultural yang akan berperan dalam memberikan pemahaman tersebut. Pendidikan multikultural harus diberikan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan rasa saling menghormati dan peduli terhadap kelompok-kelompok budaya lain (Banks, 1987).

Konsep Pendidikan Multikultural Untuk Indonesia

Berbicara soal pendidikan multikultural, Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau dengan berbagai suku, bangsa, ras, dan agama. Kemajemukan Indonesia merupakan sebuah aset penting yang harus dijaga eksistensi dan nilainya, serta identitas Indonesia dibentuk dari berbagai ciri khas budaya di setiap wilayahnya. Nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan multikultural merupakan sebuah upaya sosialisasi lintas budaya, sehingga kemudian dapat memunculkan kearifan sosial dan kearifan budaya yang dapat dijadikan tali pengikat antar individu dengan individu, dan kelompok dengan kelompok (Adhani, 2014). Interaksi yang tercipta dengan baik, maka pola komunikasi akan terjalin dengan baik tanpa adanya sikap “eksklusif” terhadap individu atau kelompok lainnya. Sikap eksklusif inilah yang dapat merusak persatuan. Jika kemudian di dalam kehidupan masyarakat yang majemuk masih dilandasi sikap eksklusif yang memiliki anggapan bahwa satu kelompok lebih baik dari kelompok yang lain, maka dalam kehidupan tersebut diliputi rasa saling curiga, prasangka negatif, bahkan khawatir. Hal-hal semacam itu dapat menjadi bahaya laten jika ada pemicunya akan terjadi perselisihan, pertentangan, kekerasan, kerusakan, bahkan konflik (Musadad, 2015).

Pendidikan multikultural ini dapat dijadikan alat untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang humanis, menyeluruh, dan adil. Bisa kita bayangkan berjuta-juta rakyat Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus aset berharga untuk menjaga segala sesuatu yang kita miliki dalam aspek kebudayaan. Hal tersebut hanya bisa terwujud ketika sistem pendidikan kita mencukupi untuk mengimplementasikan konsep pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan dan cara mendidik yang menghargai pluralitas dan heterogenitas secara humanistik (Ambarudin, 2016). Beberapa hal yang harus termuat dalam nilai pendidikan multikultural adalah; (1) pemahaman tentang keragaman budaya, (2) pembekalan tentang pendekatan dalam interaksi sosial, (3) pemahaman akan pluralisme dan anti diskriminasi, serta (4) refleksi dari keberagaman untuk meningkatkan kesadaran plural (Rosyda, 2014, hlm. 3).

Setiap anggota warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dalam rangka mencapai prestasi atas apa yang telah mereka pelajari. Pendidikan yang diselenggarakan negara harus merata kepada semua lini di setiap wilayah Nusantara. Pendidikan multikultural diselenggarakan tanpa diskriminasi dalam lingkungan pendidikan, semua anak harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan etnik, budaya, dan agama, serta kemudian memberikan penghargaan terhadap keberagaman, dan memberikan hak-hak yang sama bagi etnik minoritas sebagai upaya memperkuat persatuan dan kesatuan, identitas nasional, serta citra bangsa di mata dunia (Rosyda, 2014).

Pemahaman keragaman budaya biasanya sudah diajarkan sejak pendidikan dasar, seperti misalnya mengenal nama-nama suku bangsa serta budaya-budaya daerah tiap wilayah. Sebagai dasar pemahaman multikultural, hal itu cukup baik. Akan tetapi keberlanjutan tentang pemahaman tersebut yang harus menjadi perhatian. Pada jenjang-jenjang pendidikan berikutnya, pendidikan multikultural harus lebih banyak diberikan kepada siswa, dikarenakan seiring dengan bertambahnya usia siswa juga harus memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya sebagai upaya mempersiapkan diri untuk hidup sebagai makhluk sosial di tengah masyarakat. Akan ada kemungkinan bagi seseorang untuk berpindah domisili ketika misalnya menempuh pendidikan di luar kota atau sekalipun di luar pulau. Secara otomatis seseorang kemudian harus beradaptasi dengan lingkungan, tradisi, budaya yang baru sehingga ketika pendidikan multikultural sudah ditanamkan sebelum mereka berpindah ke tempat yang baru, maka kemungkinan untuk cepat beradaptasi akan jauh lebih besar (Hipolitus, 2017).

Implementasi dari pendidikan multikultural seyogyanya termuat di dalam sistem pendidikan yang kita gunakan hari ini. Menurut Tilaar (2004, hlm. 171) rancang bangun untuk melaksanakan pendidikan multikultural sebagai berikut; (1) reformasi kurikulum, (2) mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial, (3) mengembangkan potensi kurikulum, serta (4) melaksanakan pedagogik kesetaraan. Supaya kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam pendidikan multikultural dapat tersampaikan, maka harus dirancang sebuah strategi khusus untuk mengimplementasikan itu.

Jika mengacu pada konsep kurikulum yang berbasis pendidikan multikultural, maka program pembelajaran yang dikembangkan harus memiliki kesesuaian dengan kebutuhan pebelajar dan kondisi sosial (Adhani, 2014). Pendidikan multikultural dapat dijabarkan menjadi beberapa poin supaya kita dapat memahami secara holistik komponen dari pendidikan multikultural tersebut sehingga kemudian nilai-nilai penting dari pendidikan multikultural dapat tersampaikan. Castagno (2009, hlm. 47) menjabarkan beberapa komponen dalam pendidikan multikultural sebagai berikut:

1. Pendidikan Asimilasi

Keragaman dianggap sebagai sesuatu yang remeh dan cenderung diabaikan. Kekuatan akan netralitas menempati posisi yang dominan. Maka kemudian siswa akan diajari untuk memposisikan diri mereka dalam tatanan yang serba beragam sebagai wujud konkrit penerimaan pribadi terhadap berbagai perbedaan dan keragaman yang ada.

2. Pendidikan Amalgamasi

Netralitas terhadap keberagaman. Kesamaan antar individu atau kelompok ditekankan untuk mengurangi prasangka dan lebih mengutamakan persatuan. Sebagai masyarakat yang beradab tentu saja perlu untuk mengedepankan sikap bijaksana di dalam menyikapi berbagai keragaman sebagai upaya meminimalisir tendensi negatif terhadap kelompok/komunitas tertentu untuk menjaga kedamaian di dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Pendidikan Pluralisme

Posisi relativitas budaya. Mengenal dan saling menghormati perbedaan budaya sebagai bentuk aplikatif atas wawasan dan pemahaman tentang keberagaman dan perbedaan. Pluralisme sebagai kerangka praktis interaksi antar kelompok yang menunjukkan sikap saling menghormati dan toleransi antara satu dengan yang lain sebagai sebuah ciri khas masyarakat modern yang menginginkan adanya kemajuan bersama.

4. Pendidikan Kompetensi Lintas Budaya

Mendorong kompetensi dan akulturasi dalam perbedaan serta keragaman tata cara berbudaya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan partisipasi dalam situasi masyarakat yang serba beragam dalam upaya membangun harmoni sosial, budaya, dan emosional. Eksistensi berbagai kebudayaan yang muncul sebagai hasil perjalanan peradaban yang saling bertemu pada satu ruang kemudian memunculkan berbagai akulturasi.

5. Pendidikan Kesadaran Kritis

Memberikan fasilitas peningkatan kesadaran kritis terkait dengan status quo, hubungan kekuasaan, serta status sosial. Pendidikan kritis bertujuan untuk menghapus penindasan satu kelompok terhadap kelompok lain yang mencerminkan sikap keprihatinan berbagai kelompok budaya (Grant & Sleeter, 2007). Secara praktis dapat dilaksanakan berbasis pada konsep *empowering* dengan mengubah kekuasaan dominan guru yang sentralistik (*power over*), dan mengutamakan pemberdayaan siswa untuk berpikir lebih kritis (*power with*) (Kreisberg, 1992).

6. Pendidikan Aksi Sosial

Selain menyadari status quo dan ketidakadilan, siswa harus bekerja untuk mengubah struktur ketidaksetaraan dan melakukan kampanye perubahan sosial. Sasaran kampanye ini adalah untuk

mendengungkan ketidaksetaraan dan diskriminasi yang terjadi dan mengupayakan adanya kesadaran tentang keadilan sosial.

Proyek utama pendidikan multikultural dapat dipahami sebagai upaya menghidupkan pluralisme budaya yang eksis di dalam hubungan sosial masyarakat. Kelompok minoritas dan mayoritas dalam dimensi ruang memiliki peran dan posisi yang sama di dalam membangun dirinya sendiri dengan menegosiasikan batas-batas budaya daripada sekedar memaksakan citra dominan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Pendidikan multikultural berusaha untuk menyesuaikan arus budaya utama dengan budaya minoritas dengan cara yang positif, dengan pendekatan yang luwes tanpa menimbulkan konflik. Isu yang diangkat dalam pendidikan multikultural adalah penghapusan penindasan dan mengutamakan kesetaraan yang kaitannya dalam hubungan sosial (May, 1999).

Tantangan Pendidikan Multikultural di Indonesia

Konsep yang ditawarkan untuk menerapkan dan mengembangkan pendidikan multikultural di Indonesia tidak selalu mudah. Asumsi penulis setelah menelaah kajian dalam subab sebelumnya, dapat dijelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan saat merencanakan implementasi pendidikan multikultural adalah; (1) penyesuaian dengan kurikulum (2) alokasi waktu harus cukup dan efektif (3) materi yang diajarkan harus runtut (4) tujuan pembelajaran dari pendidikan multikultural harus spesifik.

Kurikulum yang ada saat ini masih belum mengakomodir kepentingan pendidikan multikultural secara menyeluruh. Pemahaman tentang keragaman masih bersifat *segmented*. Misalnya pemahaman tentang keberagaman biasanya dimuat di dalam matapelajaran humaniora. Alokasi waktu untuk satu matapelajaran humaniora biasanya dilaksanakan dalam 2x45 menit untuk satu pertemuan. Siswa yang masuk dalam kelas bidang IPS mungkin akan dapat bersinggungan sesering mungkin dengan matapelajaran humaniora. Lalu bagaimana dengan siswa yang berada di bidang lain seperti IPA, Bahasa, Agama misalnya? Sudah tentu bahwa kurikulumlah yang dapat menopang segala kepentingan implementasi pendidikan multikultural. Pengembangan kurikulum yang menggunakan pendekatan pendidikan multikultural harus berdasarkan pada prinsip; (a) keragaman budaya yang menjadi dasar dalam menentukan filsafat, teori, model serta hubungan sekolah dengan lingkungan sosial-budaya setempat, (b) keragaman budaya menjadi dasar dalam mengembangkan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi, (c) budaya di lingkungan unit pendidikan merupakan sumber belajar dan objek studi yang harus dijadikan bagian dari kegiatan peserta didik, (d) kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional (Adhani, 2014).

Perhitungan alokasi waktu untuk implementasi pendidikan multikultural harus cukup dan efektif. Alangkah lebih baik jika pendidikan multikultural dapat dijadikan sebuah matapelajaran mandiri, yang tidak terintegrasi dengan matapelajaran lain. Seperti fenomena yang masih terjadi hari ini, di setiap matapelajaran hanya menyinggung sedikit saja tentang pemahaman keberagaman dan itupun dilaksanakan dalam alokasi waktu yang tidak terlalu panjang. Maka persiapan yang di-

perluan untuk menyelenggarakan pembelajaran tentang pendidikan multikultural harus memiliki perhitungan waktu yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran (Schiering dkk., 2011).

Persiapan materi dan sumber belajar untuk pendidikan multikultural juga harus memadai secara kuantitas dan kualitas. Harus muncul konsep yang akan dijadikan pengantar dalam memahami keberagaman. Sumber belajar yang digunakan sudah selayaknya memiliki relevansi dengan kehidupan masa kini sehingga siswa mampu mengasosiasikan teori dengan kejadian nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian materi bisa dimulai dengan pengenalan konsep dan hakikat pendidikan multikultural, supaya siswa dapat melakukan *framing* di dalam pikirannya untuk menciptakan ruang baru dalam rangka memahami materi yang akan dipelajari pada waktu-waktu yang akan datang.

Hasil yang akan dicapai siswa setelah mendapatkan pemahaman tentang keberagaman harus spesifik. Artinya pembelajaran tidak hanya semata-mata dilakukan dalam rangka formalitas dengan tujuan pembelajaran yang bersifat retorik belaka (Black dkk., 2009). Pengkajian pendidikan multikultural dilakukan terlebih dahulu oleh para pakar sebelum materi disajikan kepada siswa untuk dipelajari. Hasil dari kajian itulah yang nantinya kemudian dapat dirumuskan sebagai tujuan pembelajaran multikultural, dan materi yang sudah melewati beberapa analisa dapat disajikan kepada siswa. Mengingat hari ini kita sedang berada di era revolusi industri 4.0, alangkah lebih baik apabila pendidikan multikultural disampaikan dengan menggunakan media yang menarik dan praktis, tanpa mengurangi esensi dari materi itu sendiri. Guru dapat menggunakan perangkat digital apapun dalam menyampaikan materi, sehingga efektifitas pembelajaran meningkat dan tujuan yang telah dirumuskan dalam pendidikan multikultural dapat tercapai dengan maksimal.

SIMPULAN

Pendidikan multikultural merupakan sebuah gerakan baru dalam bidang pendidikan untuk memberikan penanaman yang lebih dalam terkait dengan keberagaman, perbedaan dalam konteks lintas budaya. Wacana dari pendidikan multikultural sebenarnya sudah ada sejak lama, namun implementasinya masih belum menyeluruh sehingga kemudian dibutuhkan konsep yang matang untuk implementasi yang konkrit. Jika pendidikan multikultural benar-benar diajarkan, maka akan ada banyak pihak yang harus ikut berkontribusi dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut demikian, karena dalam implementasi pendidikan multikultural yang menyeluruh harus menyentuh ranah sistem pendidikan, tidak bisa semata-mata hanya retorika dan wacana belaka.

DAFTAR RUJUKAN

- Adhani, Y. (2014). Konsep Pendidikan Multikultural Sebagai Sarana Alternatif Pencegahan Konflik. *Jurnal Sosio Didaktika*, 1(1), 111–121.
- Agung, D. A. G. (2017). Keragaman Keberagaman: Sebuah Kodrat Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 11(2), 151–159.

- Ambarudin, R. I. (2016). Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Bangsa yang Nasionalis Religius. *Jurnal Civics*, 13(1), 28–45.
- Banks, J. (1987). *Teaching Strategies for Ethnic Studies*. Allyn and Bacon.
- Black, P., Harrison, C., Lee, C., Marshall, B., & William, D. (Ed.). (2009). *Assessment for Learning: Putting it Into Practice* (Reprinted). Open Univ. Press.
- Castagno, A. E. (2009). Making Sense of Multicultural Education: A Synthesis of the Various Typologies Found in The Literature. *Multicultural Perspective*, 11(1), 43–48.
- Grant, C. A., & Sleeter, C. E. (2007). *Doing Multicultural Education for Achievement and Equity*. Routledge.
- Hariyono. (2018). Pendidikan Sejarah dan Karakter Bangsa Sebuah Pengantar Dialog. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, 1(1), 1–22.
- Hidayat, B. (2006). Pluralisme dan Aktualisasi Diri. *Jurnal Psikologi Sosial*, 12(2), 141–152.
- Hipolitus, dkk. (2017). *Pluralisme, Multikulturalisme, dan Batas-Batas Toleransi*. Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya.
- Irhandayaningsih, A. (2012). Kajian Filosofis Multikulturalisme Indonesia. *Jurnal Humanika*, 15(9), 1–8.
- Kreisberg, S. (1992). *Transforming Power: Domination, Empowerment, and Education*. SUNY Press.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Clarendon Press; Oxford University Press.
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia di Tengah Kehidupan Sara. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 28(1), 31–37.
- May, S. (Ed.). (1999). *Critical Multiculturalism: Rethinking Multicultural and Antiracist Education*. Falmer Press.
- Musadad, A. A. (2015). Model Manajemen Pembelajaran Sejarah Terintegrasi Pendidikan Multikultural Untuk Membangun Wawasan Kebangsaan. *Jurnal Paramita*, 25(2), 247–260.
- Nurchayono, O. H. (2018). Pendidikan Multikultural di Indonesia: Analisis Sinkronis dan Diakronis. *Jurnal Pendidikan, Sosiologi dan Antropologi*, 2(1), 105–115.
- Rosyda, D. (2014). Pendidikan Multikultural di Indonesia Sebuah Pandangan Konsepsional. *Jurnal Sosio Didaktika*, 1(1), 1–12.
- Schiering, M. S., Bogner, D., & Buli-Holmberg, J. (2011). *Teaching and Learning: A Model for Academic and Social Cognition*. Rowman & Littlefield Education.
- Teasley, M., & Tyson, E. (2007). Cultural Wars and The Attack On Multiculturalism: An Afrocentric Critique. *Journal of Black Studies*, 37(3), 390–409.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Undang-Undang Dasar 1945: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang Sudah Diamandemen serta Penjelasannya, Dilengkapi Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II. tanpa tahun. Surabaya: Pustaka Agung Harapan.

Zed, M. (2004). *Metode Peneletian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.